

PERAN REGULATOR TERHADAP STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK) SAAT PANDEMI COVID-19 di INDONESIA

¹Moh Afrizal M, ²Agustina Kuria, ³Bertha Febrianti, ⁴Cindy Anisyah, ⁵Mega Putri Aulia

^{1,2,3,4,5}Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
afrizal@unipasby.ac.id

ABSTRACT

Regulation is a set of rules made to control an order to break free from transgression and be obeyed by all its members. The most global form of regulation is government regulation and the regulations used for public life. Regulation is an abstract concept of complex syncretic system management with a set of rules and trends. Regulation exists in various areas of people's lives, so the main function of regulation becomes a controller or control for any action that humans perform. Regulation, therefore, was essential to determine what step to take. In the rule of government, it is a natural extension that comes from legislation to define and control some of the proper ways of entrepreneurs or individuals to abide by current laws and be expected to apply to business. Whereas regulations are individual or businessmen's time to have control of specific things how to meet the minimum requirements of the legislature. The entity in the business should consider its continued existence in the creation of financial statements. If there is an incident after a very significant period of reporting, it will result in a threatening future. Entities obligated to appeal to whether the covid-19 pandemic can affect the survival of the wearer by taking into account all the relevant information and reporting. Indonesia's financial services authority (ojk), along with its Indonesia accounting association (iai), provides a positive signal for its continued efforts, with 68 psak adjustments on its normal value recognition and psak 71 on reserve calculations. The article explained that the government, ojk (ojk) and the Indonesian accounting association (iai), should set current accounting standards.

Keywords : Regulatory Approaches Formulating Accounting Theory

ABSTRAK

Regulasi adalah seperangkat aturan yang bertujuan untuk mengendalikan suatu tatanan yang bebas dari pelanggaran agar dapat dipatuhi oleh seluruh anggotanya. Bentuk regulasi yang paling global adalah regulasi pemerintah dan regulasi diri, yang digunakan untuk regulasi yang berlaku dalam kehidupan sosial. Regulasi adalah konsep abstrak dalam mengelola sistem kompleks yang disinkronkan dengan seperangkat aturan dan tren. Peraturan hadir dalam berbagai bidang kehidupan warga negara, maka fungsi utama peraturan adalah untuk mengontrol atau mengontrol setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan regulasi sangat penting untuk menentukan langkah apa yang akan diambil. Dalam peraturan pemerintah, yang merupakan perpanjangan alami dari hukum, untuk menentukan dan mengontrol cara yang tepat di mana pemilik bisnis atau individu mematuhi hukum yang berlaku dan diharapkan untuk menerapkannya dalam melakukan bisnis. Sedangkan pengaturan diri adalah waktu bagi individu atau pengusaha untuk mengendalikan hal-hal tertentu dalam hal memenuhi persyaratan hukum minimum. Pengusaha harus mempertimbangkan kelangsungan hidup ketika menyiapkan laporan keuangan tahunan. Jika suatu insiden terjadi setelah periode pelaporan yang sangat lama, hal itu membahayakan kelangsungan bisnis dimasa yang akan datang. Perusahaan harus menilai apakah pandemi Covid-19 dapat mempengaruhi kelangsungan pengguna perusahaan dengan memperhatikan semua informasi dan berita yang relevan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk memberikan sinyal positif terhadap kelangsungan usaha perusahaan melalui amandemen PSAK 68 terkait pengakuan nilai wajar surat berharga dan PSAK 71 untuk perhitungan cadangan. Artikel ini

menjelaskan bahwa pemerintah yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), memiliki kewenangan untuk menetapkan standar akuntansi yang berlaku.

Kata kunci : Pendekatan Regulasi Formulasi Teori Akuntansi

Submitted: 13 Mei 2022

Revised: 16 Mei 2022

Accepted: 30 Mei 2022

Email korespondensi : afrizal@unipasby.ac.id

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-2019 telah menciptakan siklus ekonomi global mendapat kejutan besar. Krisis mata uang di 1997 dan perlambatan ekonomi Amerika 2007 dibandingkan dengan iklim Perekonomian Indonesia berada di tengah pandemi Covid-19. Awal mula Covid-19 masuk di Indonesia karena adanya warga negara Indonesia yang terpapar virus tersebut yang berdomisili di Depok yang berkontak langsung dengan seorang warga negara Jepang pada 2 Maret 2020. (Indonesia.go.id) Kepercayaan manajer terhadap manufaktur mempengaruhi pasar saham dan FX.

Produksi manufaktur sebesar 45,64% pada kuartal I 2020 untuk periode Februari menurut data Bank Indonesia (BI), dan 45,3 persen pada kuartal II periode Maret 2020. Fase kontraksi perkembangannya sudah mulai menurun. (katadata.co.id dan contan.co.id,) Ada 1.139 hotel yang ditutup dan 1.174 hotel yang tutup karena shift atau PHK karyawan (smol.id). 1,2 juta pekerja telah diberhentikan atau dipecat. Hingga batas waktu pembatalan Januari, sebanyak 18.300 penerbangan telah dibatalkan di 15 bandara PT Angkasa Pura I (Persero). Maret 2020 adalah batas waktu terakhir. (tempo.co).

Indeks harga konsumen kuartal pertama 2020 per 104,33 Jan, 104,62 Feb, 104,72 Mar Inflasi ad interim per 0,39 Jan, 0,28 Feb dan 0,10 Mar (bps.go.id.) Managing Director Monetary fund Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva dan Koordinator Komite Moneter dan Keuangan Internasional (IMFC) Lesetya Kganyago.

Dikatakan bahwa pandemi Covid-19 adalah kondisi yang sebelumnya belum pernah terjadi di mana kesehatan global telah berubah menjadi krisis ekonomi dan keuangan. (republik.co.id) Untuk menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari krisis sosial, Pertahanan, keamanan, dan ekonomi, oleh karena itu Presiden Joko Widodo membuat sembilan kebijakan nasional, antara lain:

Pertama, pemotongan gubernur dan walikota. Prioritas dalam penyesuaian pendapatan. dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) (APBD).

Kedua, pemerintah pusat dan daerah akan melakukan redistribusi anggaran untuk meningkatkan tingkat kesembuhan dari Covid-19, baik dari segi kesehatan maupun ekonomitindakan tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 mengenai Penataan Kembali Kegiatan, Pemetaan Kembali Peraturan dan Pengadaan Barang dan Jasa untuk mempercepat Penanganan Covid-19.

Ketiga, pemerintah pusat dan daerah mengamankan pasokan bahan pokok, serta daya beli masyarakat, khususnya masyarakat menengah kebawah.

Keempat, kejadian pemborosan uang yang direproduksi dan direproduksi dengan memanfaatkan anjuran wajib yang harus diikuti sesuai dengan strategi pencegahan virus covid-19 yaitu menjaga jarak aman satu sama lain. Secara spesifik, Khusus terkait program cash intensif di beberapa departemen seperti Departemen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Departemen Perhubungan, Departemen Pertanian dan Departemen Kelautan dan Perikanan.

Kelima, pemerintah memberikan tambahan Rp50.000 selama enam bulan kepada pemegang kartu sembako murah. Dengan demikian, peserta kartu sembako mendapat Rp 200.000 per keluarga per bulan. Untuk melaksanakan tambahan alokasi sembako ini, pemerintah menganggarkan portofolio sebesar Rp 4,56 triliun.

Keenam, mempercepat penggunaan kartu prakerja untuk mencegah pekerja yang di-PHK, pekerja yang kehilangan pendapatan dan pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan pendapatan. Dengan dikembangkannya kartu pra kerja, diharapkan warga yang terkena dampak dapat meningkatkan keterampilan dan kualitasnya. Tahun Saat ini, pemerintah telah mengalokasikan Rp 10 triliun untuk kartu prakerja.

Ketujuh, pemerintah juga membayar pajak penghasilan Pasal 21 (PPh) yang dibayarkan oleh pekerja di industri manufaktur. Alokasi anggaran yang ditetapkan mencapai Rp 8,6 triliun.

Kedelapan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan pelonggaran kredit di bawah Rp10 miliar untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pelonggaran tersebut berupa penurunan suku bunga dan penangguhan pembayaran selama satu tahun baik dari pelaku industri keuangan bank maupun non bank. Selain itu, penangguhan tarif selama satu tahun juga berlaku bagi ojek, sopir taksi, dan nelayan yang mencicil. Bank dan non-bank tidak boleh mengejar debitur.

Kesembilan, masyarakat berpenghasilan rendah yang mengajukan KPR Subsidi diberikan insentif. Negara memberikan subsidi bunga hingga 10 kali angsuran tahunan.

Jika bunganya lebih dari lima persen, selisihnya ditanggung negara. Selain itu, ada juga hibah bersubsidi untuk KPR bersubsidi dengan alokasi Regulasi siap mencapai Rp. 1,5 triliun. (Kompas.com) Poin kedelapan dari sembilan pedoman nasional tersebut di atas menunjukkan hal ini Sektor jasa keuangan juga terpengaruh, yang menyebabkan ketidakpastian ekonomi global dan nasional yang signifikan. Akibat perekonomian yang tidak stabil, hal ini berdampak kuat pada standar akuntansi, mengganggu produktivitas emiten, perusahaan publik dan juga auditor (Wolk, Harry I., James L.Dodd, tidak bertanggung).

Standar yang dikeluarkan oleh otoritas akuntansi dalam hal ini di Indonesia adalah OJK, yang biasanya menyampaikan cara lain untuk memilih tingkat kebijakan akuntansi, yaitu

- 1) otoritas akuntansi memiliki kewenangan untuk menentukan standar akuntansi yang akan diterapkan, dan
- 2) manajemen organisasi memiliki wewenang untuk menentukan akuntansi. Akuntansi yang akan digunakan dalam proses akuntansi. Organisasi. (Baridwan, 2000)

Di masa pandemi Covid19, OJK bersama Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK - IAI) menjalankan fungsinya sebagai regulator namun tidak tampak memediasi pilihan kebijakan akuntansi Tier 2(2) sebagai dibahas oleh Baridwan, 2000. OJK berwenang menetapkan standar akuntansi yang berlaku. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas hal tersebut melalui penulisan ini sehingga penulis menyampaikan pokok bahasan dari makalah ini yaitu "KARYA PENGATURAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK) selama PANDEM COVID19 di INDONESIA.

METODE PENGUMPULAN DATA

Pendekatan pengumpulan data studi lapangan digunakan dalam penelitian ini. Metode ini digunakan untuk membandingkan penurunan antar bank yang disebabkan oleh penutupan banyak bank umum di Indonesia dengan BPR yang bank induknya ditutup diikuti dengan penutupan beberapa kantor di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini berdampak pada produktivitas usaha dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

pada penelitian tersebut, teknik yang digunakan dalam studi lapangan adalah studi observasional dan studi literatur.

METODE DATA ANALISA

Metode yang digunakan untuk analisis data adalah metode deskriptif, metode ini digunakan untuk memecahkan masalah yang diamati yaitu penurunan yang terjadi pada bank umum dan bank perkreditan rakyat.

HASIL DAN PEMBAHASAN Industri perbankan diindonesia

Industri perbankan merupakan salah satu dampak langsung dari pandemi Covid-19. Perbankan merupakan salah satu industri yang memiliki pengaruh besar terhadap keadaan perekonomian suatu negara. Bank adalah suatu usaha yang mengambil uang dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan kemudian mengembalikannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau bentuk lain untuk membantu masyarakat memperbaiki taraf hidupnya. Bank umum, bank swasta, bank pembangunan daerah, dan kantor cabang luar negeri adalah empat jenis bank.

Data statistik pertumbuhan bank umum dan bank umum dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk Desember 2019, Januari 2020, dan Februari 2020. Ini merupakan peningkatan yang signifikan.

Tabel 1. Pertumbuhan Bank Umum dan Bank Perkreditan di Indonesia

Keterangan	Tahun 2019	Tahun 2020	
	Desember	Januari	Februari
Jumlah bank			
Bank Umum	110	110	110
Bank Perkreditan Rakyat	1.545	1.542	1.542
Jumlah			
Bank Umum	31.127	31.125	31.087
Bank perkreditan Rakyat	5.939	5.964	5.930

Data Olahan : Sumber ojk.go.id

Berdasarkan data yang ada, jumlah BPR akan berkurang 3 bank pada tahun 2020. Sebaliknya, bank umum tetap di angka 110. Namun, menurut data jumlah cabang di seluruh Indonesia, per Februari 2020, 2 bank komersial telah kehilangan 2 cabang dari bulan sebelumnya dan telah berkurang secara drastis sebanyak 34 kantor. Menurut penulis, bank umum telah tutup di sejumlah tempat di seluruh Indonesia. Sementara itu, bank utama BPR ditutup, dan pos-pos mereka di berbagai wilayah di Indonesia ditutup. Ini adalah masalah yang berat karena memiliki dampak yang signifikan terhadap produktivitas perusahaan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kegiatan Usaha Perbankan

Bank Indonesia melalui Peraturan Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 mengatur beberapa hal penting yang mempengaruhi kerugian kredit dan penurunan nilai, yaitu:

Angka 5: Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang sebanding berdasarkan perjanjian atau perjanjian kredit antara bank dan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk membayar kembali pinjamannya dengan bunga setelah jangka waktu tertentu, meliputi:

- a. Cerukan, yaitu saldo negative yang ada di rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
- b. penerimaan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang; dan
- c. Menerima atau membeli kredit dari pihak lain.

Angka 20. Penyisihan penilaian, juga dikenal sebagai CKPN, dibuat ketika nilai buku aset keuangan setelah penurunan nilai lebih kecil dari nilai buku aslinya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pembentukan biaya CKPN berdampak pada pendapatan dan kinerja keuangan. Artinya, bank umum syariah harus menetapkan biaya CKPN untuk mengurangi risiko kemungkinan penurunan nilai. 2016 (Suhartini dan Anwar).

Hasil penelitian pengaruh risiko bisnis dan good governance terhadap skor kesehatan bank pada Bank Umum Devisa Swasta Nasional menunjukkan bahwa variabel NPL, CKPN pada kredit, IRR, PDN, LDR, IPR, BOPO, FIR, dan GCG memiliki dampak yang substansial. Untuk skor kesehatan bank, ini sangat penting. Dengan kata lain, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan GCG semuanya berdampak besar pada skor kesehatan bank sebesar 26,9% (Damayanti, D D dan Chaniago, Herizon, 2014).

Standar Akuntansi Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS). Dan yang berada di bawah kendali regulator pasar modal bagi perusahaan- perusahaan.

Efektif 1 Januari 2015, Indonesia telah mencapai konvergensi keseluruhan dengan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) efektif 1 Januari 2014. DSAK IAI berhasil menutup kesenjangan tiga tahun antara kedua standar menjadi satu tahun pada 1 Januari 2012. pada tanggal 1 Januari 2012, Januari 2015. Hal ini merupakan bentuk keterlibatan DSAK IAI dengan Indonesia, perannya sebagai satu- satunya anggota G20 di Asia Tenggara.

DSAK IAI telah menerbitkan PSAK dan ISAK, antara lain produk non-IFRS, seperti PSAK 28 dan PSAK 38, ISAK 31, ISAK 32, ISAK 35, dan ISAK 36, selain SAK berbasis IFRS. Adanya kesenjangan yang semakin menyempit antara SAK dan IFRS diharapkan dapat membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan di Indonesia. Perusahaan yang mempunyai akuntabilitas publik, regulator yang berusaha menciptakan Infrastruktur regulasi yang diperlukan, khususnya untuk transaksi pasar modal, dan pengguna informasi keuangan dapat berpedoman pada SAK sebagai pedoman peningkatan kualitas informasi keuangan.

Pembuatan dan pencabutan SAK harus mengikuti tata cara yang diatur dalam Peraturan Akuntansi Obligasi Indonesia. Prosesnya meliputi identifikasi masalah, konsultasi dengan Dewan Pertimbangan SAK (DKSAK) (bila perlu), melakukan penelitian terbatas, membahas materi SAK, menyetujui dan menerbitkan draf. Sedangkan penyusunan Buletin Teknis dan Perbaikan Tahunan tidak harus mengikuti semua tahapan alur proses yang benar.

Efektif 1 Januari 2020, SAK tersebut adalah PSAK 43, termasuk PSAK 8 yang berkaitan dengan peristiwa setelah tanggal neraca, PSAK 68 terkait pengukuran nilai wajar dan PSAK 71 terkait instrumen keuangan.

PSAK 8 : Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

DSAK dan IAI menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa Covid-19 akan berdampak signifikan terhadap Peristiwa Pasca Masa (PSPP). Berikut rilis IAI pada PSAK 8 Paragraf 3 PSAK 8 mendefinisikan peristiwa penyesuaian

pasca-periode sebagai peristiwa yang menunjukkan bahwa kondisi telah ada pada akhir periode. Sementara itu, peristiwa pasca periode yang tidak dapat disesuaikan menunjukkan kondisi yang terjadi setelah periode tersebut.

Dengan mempertimbangkan fakta time-lapse yang timbul, DSAK IAI berpendapat bahwa penyebaran Covid-19 di Indonesia bukan merupakan peristiwa yang mempengaruhi penyajian jumlah yang diakui dalam laporan keuangan tahun 2019. Liabilitas mencerminkan kondisi yang ada pada saat tanggal neraca.

Namun, jika entitas yakin bahwa suatu peristiwa akan terjadi setelah periode pelaporan keuangan yang cukup penting untuk membahayakan kelangsungan usahanya. PSAK 8 paragraf 14 mengharuskannya untuk mempertimbangkan asumsi kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan. sebagai sumber keberlangsungan masa depan Pelaku usaha harus menentukan apakah wabah Covid-19 akan berdampak pada kelangsungan usaha dengan memperhatikan semua fakta dan informasi yang relevan, termasuk program relaksasi pemerintah. (iaiglobal.or.id)

Uraian di atas merupakan pedoman bagi pemangku kepentingan untuk mengevaluasi dan mengungkapkan laporan keuangan untuk menjaga kualitas, keandalan, dan daya banding laporan keuangan Perseroan.

Sesuai dengan pedoman DSAK dan IAI, pada tanggal 15 April 2020, OJK selaku regulator akuntansi di Indonesia telah menerbitkan pedoman penyusunan laporan keuangan, khusus penerapannya dalam ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). . 71 tentang perhitungan cadangan. dan PSAK 68 tentang Pengukuran Nilai Wajar Efek.

PSAK 68 : Pengukuran Nilai Wajar

Tahun 2020 merupakan titik balik bagi akuntan Indonesia yang ingin meraih reputasi internasional secara maksimal. Salah satu kekuatan auditor Indonesia adalah telah mengadopsi International Financial Reporting Standards (IFRS), suatu standar akuntansi internasional yang diadopsi oleh International Accounting Standards Board (IASB) dalam hal interpretasi dan kerangka kerja dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. pernyataan. Akan (Wolk et al.,

2008) Dewan Standar Akuntansi Keuangan (FASB) telah mengeluarkan FASN no. 157 tentang "Pengukuran nilai wajar," yang berfokus pada pengukuran nilai wajar dan meningkatkan pengungkapan nilai wajar. pengukuran nilai (FASB, 2006).

PSAK no. 157, Pengukuran nilai wajar digunakan untuk aset dan liabilitas tertentu. Penilaian ini mengasumsikan bahwa ketika aset dijual atau liabilitas diselesaikan, aset dan liabilitas dipertukarkan dalam transaksi yang wajar antara pelaku pasar pada saat penilaian. Teknik penilaian yang digunakan didasarkan pada tiga (tiga) pendekatan berikut: Pendekatan Pasar Pendekatan ini menggunakan harga dan informasi lain yang relevan dan menghasilkan transaksi pasar yang melibatkan aset dan kewajiban yang homogen atau sebanding Pendekatan Pendapatan Pendekatan ini menggunakan teknik penilaian yang melibatkan masa depan untuk konversi nilai sekarang. Metode nilai sekarang dapat digunakan sebagai alat analisis; Model penetapan harga opsi seperti formula Black-Scholes-Merton, contoh binomial, dan metode pendapatan berlebih multi-periode untuk menentukan nilai wajar aset tidak berwujud. Pendekatan Biaya Pendekatan ini tepat mengingat jumlah yang sekarang dapat diperoleh untuk menggantikan kapasitas aset (atau sering mengakibatkan biaya penggantian yang berkelanjutan).

PSAK No. 157 menyajikan hierarki nilai wajar untuk meningkatkan komparabilitas dan konsistensi metrik ini (Wolk, Harry I., James L. Dodd, n.d.) Untuk menilai nilai wajar dalam tiga tingkatan, terdapat hierarki nilai wajar atau prioritas masukan. Hirarki nilai wajar dibagi menjadi tiga tingkatan:

1. Harga kuotasi (tidak disesuaikan) untuk aset dan kewajiban serupa yang dilaporkan oleh perusahaan yang memiliki akses ke pasar aktif pada tanggal pengukuran membentuk Level 1 dari lapisan ini (FASB, 2006). Level ini menentukan input terpenting untuk menghitung nilai entri wajar. Input dengan kualitas sangat tinggi, yaitu input yang dapat dilihat atau berdasarkan data pasar yang dikumpulkan dari sumber selain lembaga pelapor. Ketika harga penawaran sudah siap, input juga dikumpulkan dari pasar yang aktif.
2. Kutipan level 1 lain yang dapat diamati untuk aset dan kewajiban (langsung atau tidak langsung) adalah input Level 2 pada level ini. Input pada tingkat ini harus terlihat untuk semua aset dan kewajiban, kecuali aset atau kewajiban tersebut berada dalam pengaturan yang unik. pada tingkat ini meliputi:
 - a. Harga yang dikutip untuk aset dan kewajiban serupa di pasar Aktif;
 - b. Harga yang dikutip untuk aset dan kewajiban serupa di pasar yang tidak aktif berarti ada lebih sedikit transaksi dalam aset dan kewajiban. Ketika harga tidak diperbarui, atau harga bervariasi secara signifikan dari waktu ke

waktu atau antar pelaku pasar, atau ketika sedikit informasi yang dipublikasikan

- c. Input selain harga kuotasi dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas;
 - d. Masukan berasal dari data asal pasar yang dapat diamati menggunakan hubungan (FASB, 2006).
3. Tingkat ketiga Input tidak dapat dilihat sebagai aset dan kewajiban pada tingkat ini. Input yang tidak dapat diobservasi dapat diturunkan dari data terbaik yang tersedia dalam berbagai situasi, dan dapat mencakup data dari entitas pelapor. (FASB, 2006).

Karena perubahan yang parah dan penurunan besar dalam jumlah transaksi di bursa, OJK memberikan saran kepada industri perbankan mengenai penerapan PSAK 68 terhadap surat berharga, yang berdampak pada pertimbangan bank dalam menilai nilai wajar. Pembinaan kepada bank yang diberikan oleh OJK:

- a. Evaluasi pemotongan yang mengacu pada harga pasar (mark to market) SUN dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah termasuk surat berharga Bank Indonesia selama enam bulan. Selama masa penundaan tersebut, bank dapat menggunakan harga kuotasi per 31 Maret 2020 sebagai penilaian atas surat berharga tersebut.
- b. Menunda penilaian harga pasar surat berharga lainnya (mark to market) selama enam bulan untuk memastikan kinerja emiten memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Selama masa tunggu, bank dapat menilai surat berharga dengan menggunakan harga kuotasi per 31 Maret 2020. Jika kinerja penerbit surat berharga dinyatakan baik atau buruk, bank dapat menilainya dengan model sendiri dan banyak asumsi, seperti suku bunga, pinjaman, risiko kredit penerbit, dan sebagainya..
- c. melakukan apa yang menjelaskan perbedaan perlakuan akuntansi yang mengacu pada pedoman OJK menggunakan standar akuntansi yang dipersyaratkan oleh PSAK 68.or.or.id)

Perusahaan didirikan untuk memperhatikan kondisi pasar sebagai kunci utama untuk mengukur nilai wajar dalam kondisi pasar aktif dan tidak aktif, karena akuntansi nilai wajar dianggap telah membantu bank memperkuat solvabilitasnya selama krisis keuangan 2008 (Laux, 2010). Ketika ada banyak aktivitas di pasar, informasi yang diberikan dapat memenuhi kriteria relevansi, ketergantungan, komparabilitas, dan konsistensi.

Keterbandingan dibatasi oleh kemungkinan penerapan metodologi penilaian untuk estimasi input yang tidak direkonsiliasi, tetapi konsistensi kualitas masih dapat dicapai melalui pengungkapan. Pengukuran ini berpotensi menyebabkan aset jatuh dari pasar yang tidak aktif, oleh karena itu biaya dan manfaat, serta materialitas, harus dipertimbangkan ketika mengambil keputusan (Sonoto, 2010). Relevansi dan keandalan, yang tampak jelas dan rutin, tidak dapat didefinisikan secara independen karena mereka berubah seiring waktu. Konsumsi nilai wajar yang ideal kemungkinan akan diingat sebagai bab yang menarik di sebagian besar perbaikan dalam pelaporan keuangan pragmatis oleh sejarawan masa depan. (Kekuatan, Michael.2010)

PSAK 71 : Instrumen Keuangan

Padatanggal awal implementasi PSAK 71, 1 Januari 2020, IAI memberikan kejelasan dan pedoman untuk menilai apakah pandemi Covid-19 dapat mempengaruhi perhitungan Perkiraan Kerugian Kredit (KKE) atau Perkiraan Kerugian Kredit (ECL).

PSAK 71 paragraf 5.5.17 butir (c) mengharuskan entitas untuk mengelola KKE dengan cara yang mencerminkan informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya pada tanggal pelaporan tentang peristiwa masa lalu, kondisi saat ini, dan prakiraan kondisi ekonomi masa depan.

- a. Entitas tidak dapat menggunakan pengetahuan dan informasi terkait pandemi Covid-19 di Indonesia per 31 Desember 2019, untuk mengukur KKE, termasuk memasukkan berita ke dalam skenario pemodelan sinkron estimasi probabilitas tertimbang pada tanggal penerapan awal PSAK 71 (yaitu Januari 1, 2020). Otoritas jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan membuat regulasi: a. Mematuhi dan melaksanakan POJKI Nomor 11/POJK.03/2020 dan secara produktif mengidentifikasi debitur yang telah berkinerja baik namun kinerjanya menurun akibat dampak Covid-19.
- b. Penerapan skema restrukturisasi mengacu pada hasil penilaian akurat yang disesuaikan dengan profil debitur yang benar-benar terdampak COVID-19.

- c. Klasifikasikan debitur yang telah mendapatkan skema restrukturisasi tahap 1 dan tidak memerlukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).
- d. Melaksanakan identifikasi dan pemantauan secara berkesinambungan dan berjaga-jaga untuk terus menetapkan CKPN apabila debitur yang telah menerima Restrukturisasi fasilitas yang awalnya berjalan baik, diperkirakan akan menurun akibat dampak Covid-19 dan tidak dapat pulih kembali setelah direstrukturisasi atau karena berakhirnya Covid.

Menurut IAI, perkiraan KKE pada 2020 sebagian besar dipengaruhi oleh langkah-langkah relaksasi pemerintah. PSAK 71 menetapkan kerangka kerja untuk menetapkan jumlah KKE yang harus diakui pada setiap tanggal pelaporan keuangan dengan menggunakan pendekatan yang umum digunakan. IAI memberikan rekomendasi kepada bisnis tentang cara mengukur hal-hal berikut:

- a. Penyisihan KKE untuk instrumen keuangan 12 bulan ke depan, yaitu risiko kerugian 12 bulan ke depan. Jika risiko kredit instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pertama kali diakui (PSAK 71, paragraf 5.5.5); atau
- b. Penyisihan KKE sepanjang umur instrumen keuangan, yaitu risiko kerugian selama estimasi sisa umur. Jika risiko kredit instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan setelah pertama kali diakui (PSAK 71 Paragraf 5.5.3).

Akibatnya, PSAK 71 mengamanatkan bahwa KKE diakui sepanjang umur instrumen keuangan jika terjadi Peningkatan Risiko Kredit (PSRK) yang Signifikan. Entitas harus memeriksa perubahan risiko gagal bayar yang tersedia selama estimasi umur instrumen keuangan ketika mengevaluasi SPJ (PSAK 71 Paragraf 5.5.9).

Teori Regulasi

Definisi pasar persaingan penuh adalah pasar yang efisien dan mendorong interaksi aktif di antara para pemangku kepentingan. Neoliberal dan kapitalis memprediksi situasi ini, tetapi ekonomi tidak akan selalu stabil, sehingga pasar tidak akan selalu dalam kondisi persaingan sempurna, dan tujuan sosial tidak akan tercapai jika tidak ada regulasi (Wolk et al.,2017)

Namun demikian, asumsi bahwa pasar yang efisien memainkan peran penting dalam penetapan standar. Alasan Asumsi Inefisiensi Pasar dari Perspektif Konseptual dan Praktis Ketika GAAP dirancang dengan menggunakan asumsi efisiensi pasar, tidak menjelaskan apakah hal ini akan menghasilkan kondisi efisiensi pasar yang stabil (Kothari et al., 2010)

Dua asumsi mendukung gagasan tradisional tentang regulasi "kepentingan publik". Pertama pasar sering gagal karena kesulitan monopolistik atau eksternalitas. Kedua, pemerintah diyakini dapat menggunakan regulasi untuk mengatasi kegagalan pasar. Kepentingan publik, di sisi lain, sering menjadi dasar regulasi ekonomi publik saat ini. (Shleifer.A, 2005)

Krisis likuiditas, krisis keuangan, atau penciptaan model baru adalah semua aspek dari krisis ekonomi. Kebijakan investasi, kebijakan pembiayaan, dan kredit perdagangan adalah hal-hal yang diperlukan oleh pemerintah. Krisis perbankan akan berubah menjadi bencana utang negara jika pemerintah tidak mengatur. Karena tujuannya semata-mata untuk bertahan dalam kondisi krisis, investor akan mengalihkan objek kegiatannya, menjual aset untuk mencari pembiayaan, dan merundingkan kembali berbagai kontrak, sehingga menurunkan biaya operasional.

Kesimpulan dan Saran

1. Dikatakan bahwa pandemi Covid-19 adalah kondisi yang sebelumnya belum pernah terjadi di mana kesehatan global telah berubah menjadi krisis ekonomi dan keuangan.
2. Industri perbankan merupakan salah satu dampak langsung dari pandemi Covid-19. Perbankan merupakan salah satu industri yang memiliki pengaruh besar terhadap keadaan perekonomian suatu negara. Bank adalah suatu usaha yang mengambil uang dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan kemudian mengembalikannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau bentuk lain untuk membantu masyarakat memperbaiki taraf hidupnya. Bank umum, bank swasta, bank pembangunan daerah, dan kantor cabang luar negeri adalah empat jenis bank.
3. Reformasi yang dilakukan oleh OJK selaku regulator adalah dengan menerbitkan ketentuan penyesuaian penerapan PSAK 71 tentang Perhitungan Cadangan dan PSAK 68 tentang Pengukuran Nilai Wajar Surat Berharga yang

dilakukan dalam rangka antisipasi dan keselarasan negara dengan pemulihan ekonomi di Indonesia.

4. Di masa pandemi Covid-19, Teori Akuntansi menunjukkan eksistensinya sebagai ilmu yang tidak hanya membahas angka untung rugi, atau hanya sekedar mempublikasikan debit-kredit, angka kaku tanpa nyawa, namun terbukti teori akuntansi berdampak pada kehidupan sosial ekonomi yang merupakan kebutuhan primer setiap manusia di era ini.

DAFTAR PUSTAKA

Laux, C. and C. L. (2010). Did Fair-Value Accounting Contribute to the Financial Crisis? *Journal of Economic Perspectives*, 24(1), 93–118.

Wolk, Harry I., James L. Dodd, dan J. J. R. (n.d.). *No Title Accounting Theory: Conceptual Issues in a Political and Economic Environment*. SAGE.

Lestari Laila puji, Afrizal Moh Miradji (2021), pengaruh risiko kredit dan likuiditas terhadap penilaian tingkat kesehatan bank, *Journal of Sustainability Bussiness Research (JSBR Volume 2 Issue 3 oktober 2021)*

Tony Agusta, Moh Afrizal Miradji, Widiar Onny Kurniawan (2021) , pengaruh biaya produksi dan biaya pemasaran terhadap volume penjualan pt.cipta karya buana, *Journal of Sustainability Bussiness Research (JSBR Volume 2 Issue 4 ,Desember 2021)*

Lailina Puji Lestari, Moh Afrizal Miradji (2021), pengaruh risiko kredit dan likuiditas terhadap penilaian tingkat kesehatan bank, *Journal of Sustainability Bussiness Research (JSBR Volume 2 Issue 3, Oktober 2021)*